

# **BAB I**

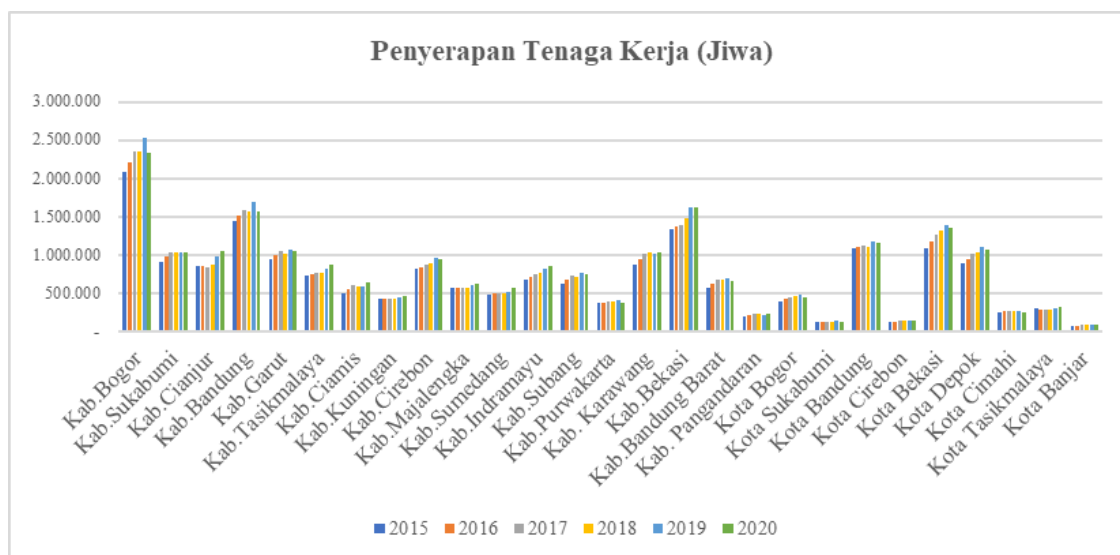
## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi memerlukan adanya sumber daya manusia yang dialokasikan dengan efektif, proporsi dan produktivitas tenaga kerja dapat menentukan kekayaan suatu negara, sehingga untuk dapat meningkatkan kekayaan suatu negara tersebut perlu ada nya pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif hal ini disampaikan oleh Adam Smith (Mukherjee, 2002). Sumber daya manusia sebagai modal produksi disuatu negara perlu memiliki kualitas yang memadai untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Berdasarkan teori upah efisiensi oleh Keynesian para pekerja yang diberi upah tinggi dapat mendorong pekerja tersebut untuk lebih produktif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan itu sendiri (Lokanathan V., 2018). Pendapatan masyarakat dapat menurun jika tingkat upah menurun sehingga akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang juga mengalami penurunan, sehingga perusahaan akan mengurangi kebutuhan tenaganya karena nilai marjinal produktivitas tenaga kerja menurun akibat konsumsi secara keseluruhan berkurang (Purwanti, Wijaya, Meigawati, & Kusumah, 2021).

Provinsi Jawa Barat akan menghadapi masa bonus demografi karena menjadi salah satu wilayah sentra ekonomi dengan modal manusia dalam usia kerja terbesar di Indonesia (Ibrahim, 2020), selain itu juga merupakan tiga besar daerah dengan tingkat pengangguran paling tinggi di Indonesia. Pengangguran di suatu daerah terjadi karena banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap lapangan pekerjaan (Pratiwi, Marseto, & Sishadiyati, 2021). Adapun untuk dapat mengetahui seberapa maksimalnya daerah dalam memanfaatkan sumber daya manusia nya, maka dapat dilihat dengan keadaan terserapnya tenaga kerja. Berikut ini kondisi terserap nya pekerja lapangan kerja di setiap daerah Provinsi Jawa Barat:

**Grafik 1. Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2020**



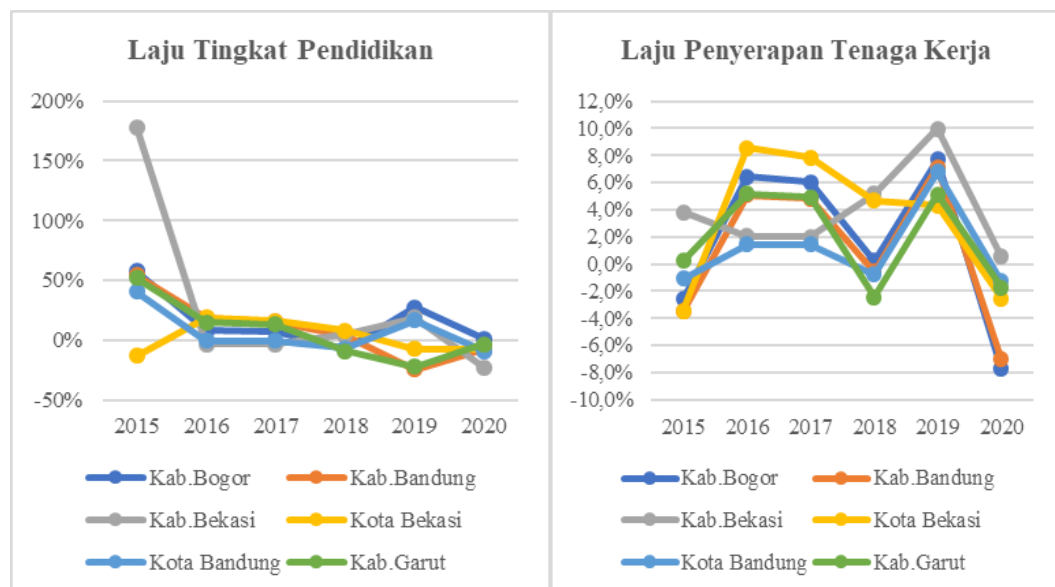
Sumber: BPS, *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat (2015-2020)*.

Dapat terlihat dari data pada grafik 1(satu) terlihat kondisi penyerapan tenaga kerja pada setiap daerah berbeda-beda keadaannya. Adapun beberapa daerah dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi di Jawa Barat antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kabupaten Garut. Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk usia kerja dalam jumlah yang besar dan adanya peran investor baik asing maupun dalam negeri yang menyerap banyak tenaga kerja. Adapun Kabupaten Garut memiliki jumlah penduduk usia kerja lebih rendah daripada Kabupaten Bogor sehingga hal ini juga mempengaruhi besaran penyerapan tenaga kerja nya dan penduduknya didominasi oleh pekerja sektor pertanian dimana sektor pertanian memiliki siklus lebih lambat dan efek *multiplier* nya lebih rendah dibandingkan dengan daerah dengan unggulan pada sektor industri (BAPPEDA Garut, 2020). Adapun beberapa aspek yang memiliki pengaruh terhadap terserapnya pekerja antara lain tingkat pendidikan, upah minimum, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pendidikan menjadi hal penting bagi setiap angkatan kerja yang akan mencari pekerjaan. Berdasarkan teori *human capital* oleh Becker menyebutkan bahwa untuk meningkatkan *skill* manusia dapat diperoleh melalui proses

pendidikan, sehingga kualitas angkatan kerja dapat terlihat dari seberapa tinggi jenjang pendidikan yang mampu dicapai (Yulistiyono, et al., 2021). Menurut (Tirtarahardja dan Sulo, 2005) dalam (Ganie, 2017) melalui pendidikan *skill* tenaga kerja dapat disiapkan, dimana terdapat kegiatan yang memberikan bimbingan terhadap para peserta didiknya yang kemudian mereka dapat memiliki bekal dasar untuk memasuki dunia kerja. Berikut data angkatan kerja di Kabupaten/Kota Jawa Barat berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan kategori perguruan tinggi tingkat DI/II/III/Akademi/Universitas kurun waktu 2015 – 2020 :

**Grafik 2. Laju Pertumbuhan Tingkat Pendidikan dan Laju Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020**



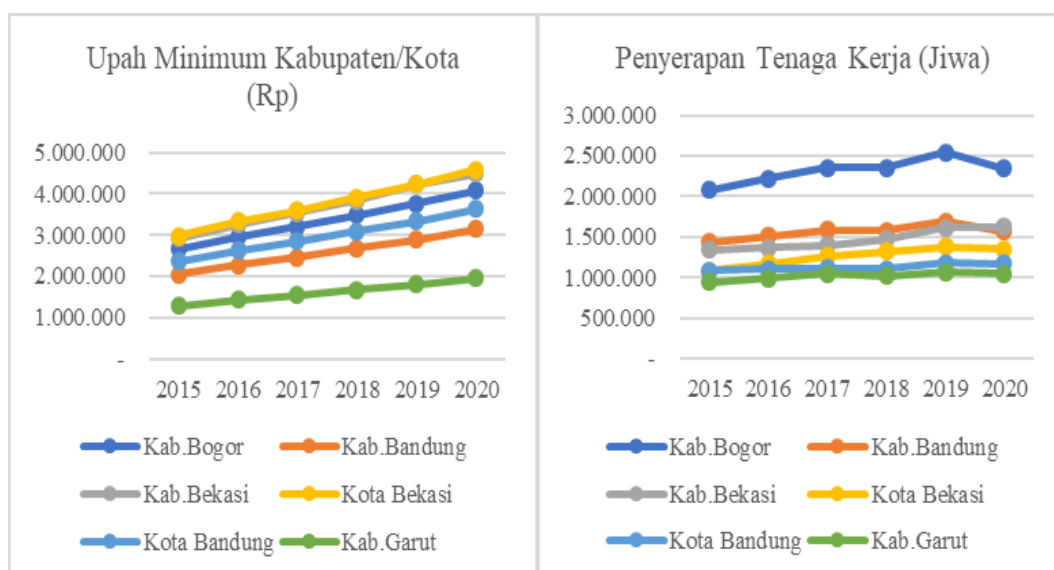
Sumber: BPS Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat (2015-2020).

Berdasarkan data pada grafik 2(dua) dimana pada tahun 2020 tingkat pendidikan Kabupaten Bogor meningkat akan tetapi penyerapan tenaga kerja nya menurun, hal tersebut karena adanya pandemi Covid-19 dimana banyak perusahaan dan industri yang terdampak sehingga berdampak pula pada penyerapan tenaga kerja (Komisi IX DPR RI, 2020). Adapun pada tahun 2018 tingkat pendidikan Kabupaten Bandung mengalami peningkatan akan tetapi penyerapan tenaga kerja nya menurun, kondisi tersebut akibat pekerja sektor pertanian menurun karena kemarau panjang, program Citarum Harum sehingga

saluran pembuangan limbah ditutup yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja, dan terbatasnya kesempatan kerja (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2018). Pada tahun 2020 tingkat pendidikan Kabupaten Bekasi menurun akan tetapi penyerapan tenaga kerja meningkat, hal tersebut karena Pemerintah Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia dalam menjalankan program nasional dimana kurikulum dalam proses pembelajarannya berdasarkan yang dibutuhkan dari para tenaga kerja khususnya pada sektor otomotif (Ferdinan, 2020). Pada tahun 2016 dan 2017 tingkat pendidikan Kota Bandung menurun akan tetapi penyerapan tenaga kerja meningkat, hal tersebut karena banyaknya lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung terserap oleh sektor pariwisata dan menjadi entrepreneur (Tessar, 2017). Pada tahun 2019 tingkat pendidikan Kabupaten Garut menurun akan tetapi penyerapan tenaga kerja meningkat, hal tersebut karena bertambahnya investor dan dengan adanya PT. Changsin Reksa Jaya (Abidin, 2019). Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa adanya gap dimana tingkat pendidikan meningkat tidak selalu meningkatkan tenaga kerja yang terserap.

Upah minimum juga memiliki dampak pada terserapnya tenaga kerja, dimana upah yang meningkat diharapkan mampu mendorong penyerapan tenaga kerja, karena permintaan tenaga kerja terdidik dan memiliki *skill* dapat meningkat, selain itu juga dengan upah yang meningkat maka dapat mendorong para tenaga kerja lebih produktif, daya beli masyarakat meningkat sehingga produktifitas perusahaan akan meningkat kemudian para pengusaha akan menambah permintaan jumlah tenaga kerja (Iksan, Arifin, & WahyudiSuliswanto, 2020). Berikut adalah data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten/Kota Jawa Barat tahun 2015 – 2020 :

**Grafik 3. UMK dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020**



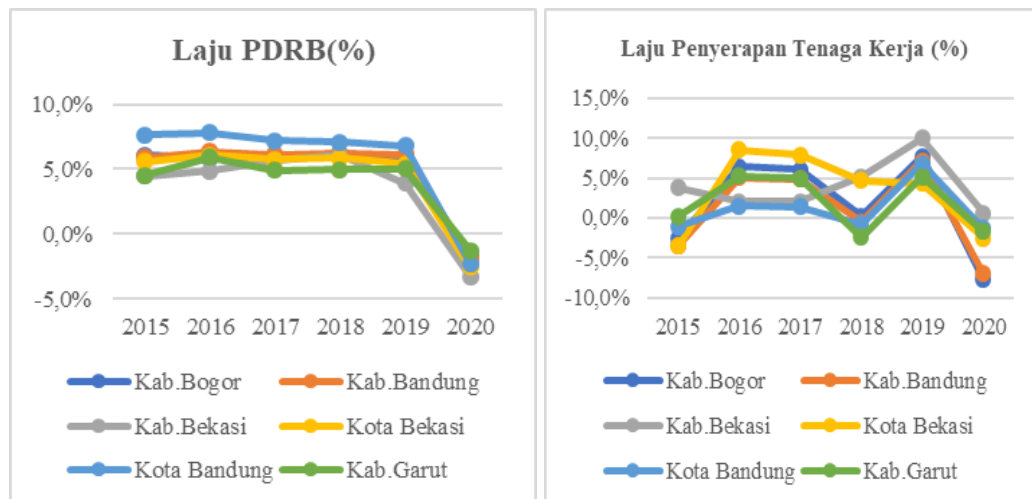
Sumber: Disnakertrans Jawa Barat, Keputusan Gubernur Jawa Barat (2015-2020).

Pada grafik 3(tiga) terlihat bahwa UMK Kota Bekasi lebih besar daripada Kabupaten Bogor akan tetapi penyerapan tenaga kerja Kota Bekasi lebih rendah, hal tersebut karena jumlah angkatan kerja Kota Bekasi lebih rendah dan terdapat beberapa pengusaha garmen yang memutuskan untuk pindah ke lokasi di luar Kota Bekasi di mana salah satu faktor nya yaitu akibat UMK yang terlalu tinggi (Buana, 2018). Adapun Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan UMK lebih besar daripada Kabupaten Bandung akan tetapi penyerapan tenaga kerja lebih rendah, hal tersebut karena jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bekasi lebih rendah dan menurut para pengusaha UMK terlalu tinggi dan memberatkan sehingga beberapa perusahaan meninggalkan daerah tersebut (Goestjahjanti, 2020). Upah minimum Kabupaten Bogor lebih rendah daripada Kabupaten Bekasi namun penyerapan tenaga kerja Kabupaten Bogor lebih tinggi, hal tersebut karena jumlah angkatan kerja Kabupaten Bogor lebih banyak dan melimpahnya potensi SDA oleh karena itu sektor pertanian juga banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Bogor (Komisi IX DPR RI, 2020). Adapun UMK Kabupaten Bandung lebih rendah daripada Kota Bandung akan tetapi penyerapan tenaga kerja Kabupaten Bandung lebih tinggi, hal tersebut karena adanya peran investasi asing dan dalam negeri yang mampu menyerap tenaga kerja (DPMPTSP Provinsi Jawa

Barat, 2020). Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan adanya gap yaitu daerah yang memiliki UMK yang tinggi belum dapat meningkatkan terserapnya tenaga kerja.

Adapun PDRB juga menjadi faktor terserapnya para pekerja, dimana PDRB ialah tambahan nilai dari barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh berbagai sektor atau bidang produksi dengan jangka waktu tertentu di suatu daerah. Adanya peningkatan pada PDRB maka menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah nilai tambah dari output yang dihasilkan atau adanya peningkatan penjualan pada seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah tersebut (Ganie, 2017). Menurut (Feriyanto, 2014) dalam (Ganie, 2017) menyebutkan bahwa dengan *output* yang dihasilkan dan dijual perusahaan semakin besar maka dapat meningkatkan permintaan akan tenaga kerja untuk meningkatkan produksi karena penjualan meningkat. Berikut kondisi PDRB beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat:

**Grafik 4. Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK) dan Laju Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2015-2020).

Berdasarkan data dalam grafik 4(empat) terlihat pada tahun 2018 PDRB Kabupaten Bandung mengalami peningkatan akan tetapi penyerapan tenaga kerja menurun, hal tersebut akibat Industri Kecil Menengah (IKM) Sarung Majalaya melakukan efisiensi hingga gulung tikar sehingga berdampak pada tenaga kerja (Handriansyah, 2018). Pada tahun 2018 adanya peningkatan PDRB Kota Bandung akan tetapi penyerapan tenaga kerja menurun, kondisi tersebut terjadi akibat

pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dimana beberapa lapangan usaha mengalami perlambatan sehingga terjadi penurunan pekerja pada sektor yang memiliki peran besar (Rahmawaty, 2019). Adapun pada tahun 2018 terjadi peningkatan PDRB Kabupaten Garut tetapi terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja lantaran minimnya lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal (Salsabila H. , 2018). Pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Bekasi menurun akan tetapi penyerapan tenaga kerja meningkat, hal tersebut karena peran investasi baik asing maupun yang berasal dari dalam negeri yang dapat menyerap angkatan kerja (DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2020). Bersumber pada penjelasan tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya PDRB belum dapat meningkatnya terserapnya para tenaga kerja yang ada.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja sebagaimana dilakukan oleh Citra Islamiatus Izzah dkk (2021), Nofandillah Arumsyah Putri dan Aris Soelistyo (2018), Monica Febrianty dan Indri Arrafi Juliannisa (2021), Fivien Muslihatinningsih, Miftahul Walid dan I Wayan Subagiarta (2020), Yunie Rahayu (2020), Setiawan A.A.S dkk (2020), Setiawan Angga Bayu Nugroho dan Usman Moonti (2019), Leo Budiriansyah dkk (2018), dan Sodik Dwi Purnomo (2021) menyatakan bahwa adanya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu penyerapan tenaga kerja. Berlandaskan uraian tersebut sehingga menjadi latar belakang penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat”**.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Provinsi Jawa Barat menjadi sentra ekonomi dengan modal manusia dan penduduk pada usia kerja yang terbesar di Indonesia, hal tersebut menjadi tantangan dalam mengoptimalkan penduduk usia kerjanya, salah satunya yaitu dengan perlu diperhatikannya penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat, karena terlihat masih tingginya tingkat pengangguran sehingga mengindikasikan belum optimalnya penduduk usia kerja yang terserap lapangan kerja. Tingkat Pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas dari *human*

*capital* dimana para angkatan kerja dengan pendidikan terakhir yang ditamatkan dalam hal ini yaitu perguruan tinggi, sehingga dengan meningkatnya tingkat pendidikan diharapkan dapat meningkatkan penyerapan penduduk usia kerja, akan tetapi masih terdapat di beberapa daerah dan ditahun tertentu tidak menunjukkan adanya peningkatan tingkat pendidikan bersamaan dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Adapun faktor upah minimum, dimana setiap tahunnya UMK selalu mengalami peningkatan sehingga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja terutama yang memiliki *skill* yang tinggi dan meningkatkan produktivitas pekerja, akan tetapi masih terdapat penurunan penyerapan tenaga kerja bersamaan dengan peningkatan UMK pada beberapa daerah dan ditahun tertentu. Adapun faktor PDRB juga dapat mempengaruhi terserapnya para pekerja, di mana PDRB yang meningkat mengindikasikan bahwa hasil produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan penjualan meningkat, oleh karena itu permintaan pekerja yang dibutuhkan perusahaan akan meningkat, sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan PDRB dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, akan tetapi masih terdapat kondisi dimana peningkatan PDRB bersamaan dengan menurunnya penyerapan tenaga kerja. Bersumber dari pemaparan tersebut timbulah rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah, timbulah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.



3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat yang akan didapat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bertambahnya wawasan terkait pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
  - b. Sebagai informasi penelitian selanjutnya terkait dengan pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam memperhatikan terkait dengan tingkat pendidikan, upah minimum, dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
  - b. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta wawasan terhadap permasalahan penyerapan tenaga kerja.